

KINERJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN KELUARGA STUDI DI DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SLEMAN

Kuncoro Widhihadmoko¹, Sugiyanto²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: kuncoro.usd@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.736>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-01

Revised:

2025-10-09

Accepted:

2025-10-28

Abstract: This study aims to determine the performance of improving the welfare of KORPRI members and their families within the KORPRI Board of Directors in Sleman Regency, as mandated by the 8th KORPRI National Conference in 2015. The preamble to the KORPRI Articles of Association states that "to enhance the role of employees of the Republic of Indonesia to be more effective and efficient for the benefit of society, the nation, and the state, it is necessary to balance this with improving the welfare of KORPRI members and their families." This qualitative case study was conducted at the Technical Implementation Unit (UPTD) of the KORPRI Board of Directors Secretariat in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. Informants were selected using propulsive sampling. Data were collected using observation, interviews, and documentation studies. Primary and secondary data were integrated in content analysis. Data validation was carried out in four stages: data entry, establishing validation rules, the validation process itself, and error handling. The results of the study indicate that the leadership and organizational culture of the UPTD Secretariat of the KORPRI Board of Directors in Sleman Regency are power-sharing organizations; this organization is a learning organization that consistently measures and evaluates its programs.

Keyword: *improving welfare. Korpri management board, performance.*

PENDAHULUAN

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi: Pegawai Negeri Sipil (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari Kedinasan. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

KORPRI sebagai organisasi berfungsi untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam rangka membangun jiwa korsa sehingga akan dapat meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Kedudukan organisasi KORPRI terus mengalami dinamika positif, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah Satuan Perangkat Daerah tersendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, sejak 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 berubah menjadi UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman yang berada di bawah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman. Disinilah akan diuji anteseden kinerja organisasi meliputi risiko organisasi, manajemen sumber daya manusia organisasi, heterogenitas organisasi, dan gaya kepemimpinan organisasi [1].

Penjelasan dinamika di atas menegaskan kedudukan UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang merupakan unsur pendukung Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan. UPTD KORPRI berada di bawah Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan karena urusan kesejahteraan pegawai masuk pada salah satu urusan pemerintahan yang diampu oleh Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan.

Tujuan pembentukan UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman sebagai pendukung Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Tujuan pembentukan pembentukan KORPRI itu sendiri antara lain; 1) meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya, 2) fasilitator atau pelaksana teknis kegiatan-kegiatan dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman, 3) sebagai unit kerja pengelola dana atau anggaran dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman karena Kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan tambahan di luar kedinasan sehingga perlu pengelolaan tersendiri, dan 4) menghubungkan antara anggota KORPRI dengan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman.

Mengacu hasil MUNAS KORPRI VIII Tahun 2015 pada pembukaan Anggaran Dasar KORPRI disebutkan bahwa untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya.

Berbagai layanan yang diberikan oleh KORPRI kepada anggota dan keluarganya memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Layanan ini mencakup bantuan keuangan, dukungan pendidikan, dan inisiatif keterlibatan masyarakat, yang secara kolektif berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi anggota. Penelitian ini akan fokus atau mendalami kinerja UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Penelitian ini diilhami dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: pertama penelitian Yuningsih (2024)[2] yang menyatakan bahwa Korpri Kabupaten Tangerang meluncurkan aplikasi layanan untuk Korpri dan e-commerce untuk Koperasi Kabupaten Tangerang, memfasilitasi anggota Korpri mengakses layanan koperasi tanpa kendala lokasi fisik, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, serta menyediakan platform yang dapat diakses melalui perangkat seluler, menggunakan metodologi Software Development Life Cycle (SDLC) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarnya.

Kedua penelitian Ramadiani (2018)[3], yang menyatakan Sekretariat KORPRI Kota Samarinda meningkatkan kesejahteraan anggota korps pegawai negeri sipil republik Indonesia, dengan kegiatan pelayanan perumahan KORPRI bagi pegawai negeri sipil di Samarinda, dengan mengimplementasikan metode Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) pada Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Perumahan KORPRI, dengan prioritas penerima KORPRI sebagai pertimbangan sekretariat KORPRI dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penelitian ketiga Dona Kurnia dan Efmi Maiyana. (2023)[4], menegaskan bahwa KORPRI Kota Bukittinggi setiap tahun memberi beasiswa kepada putra-putri ASN Bukittinggi yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Penentuan penerima beasiswa senantiasa melalui proses seleksi yang ketat dikarenakan banyaknya pendaftar setiap tahunnya. Penentuan penerima beasiswa didasarkan pada tiga kriteria Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), penghasilan/gaji orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga, serta ada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh KORPRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini menerapkan logika fuzzy Sugeno dalam menentukan alokasi beasiswa karena logika fuzzy Sugeno dapat menyeleksi calon mahasiswa secara valid, transparan, dan adil sehingga menjamin calon terpilih benar-benar layak untuk menerima beasiswa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode fuzzy Sugeno dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan objektif dalam proses seleksi penerima beasiswa dengan menggunakan variabel yang relevan dan aturan yang telah ditentukan. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi hasil keputusan yang adil dan transparan.

Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan bahwa obyek dalam penelitian ini adalah organisasi KORPRI, tetapi ketiganya ada pembeda yaitu subyek yang diteliti. Ketiga penelitian di atas subyek pertama meluncurkan aplikasi layanan untuk Koperasi KORPRI dan e-commerce untuk Koperasi Kabupaten Tangerang, penelitian kedua peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dengan fasilitas kredit perumahan dengan metode TOPSIS dan penelitian ke tiga pemberian biasiswa bagi putra putri anggota KORPRI dengan model seleksi fuzzy Sugeno. Sedang penelitian ini subyeknya kinerja UPTD dengan sasaran anggota KORPRI dan anggota keluarganya, sehingga cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian kinerja organisasi sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi dapat berkembang dalam lingkungan yang kompleks. Mencakup berbagai dimensi, termasuk kepemimpinan, budaya, dan manajemen strategis, yang secara kolektif mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Dalam hal ini organisasi berfungsi sebagai pembelajar, yang memprioritaskan pembelajaran menunjukkan peningkatan kinerja, terutama dalam beradaptasi dengan perubahan eksternal (Kim & Lu, 2020)[5]. Permasalahan yang ada akan dalam fokus pada tiga faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi KORPRI di Kabupaten Sleman, yaitu: 1) kepemimpinan dan budaya, 2) organisasi pembelajar, dan 3) pengukuran dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul kinerja peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga di Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman, menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Kasus bersifat alamiah dan tidak ada perlakuan khusus terhadap obyek penelitian. Peneliti mendalam kasus apa yang terjadi, bagaimana proses terjadinya, kapan dan dimana kasus terjadi. Setiap kasus memiliki esensi yang mengacu kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, symbol dan pemarahan segala sesuatu (Rahardjo, 2017)[6]. Sehingga narasi deskriptif dalam penelitian ini berupa fenomena, dan gerakan pengurus, anggota dan keluarga yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2024.

Obyek penelitian kinerja peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya dilakukan di UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman DIY. Subyek penelitian kinerja peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga adalah orang yang terhimpun dalam UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kabupaten Sleman. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dalam penelitian ini informan ditetapkan sebanyak empat orang terdiri dari Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, Bidang Administrasi, Penelaah Teknis Kebijakan dan Subbagian Tata Usaha UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data, data primer dikumpulkan dengan observasi dan interview mendalam. Data sekunder dikoleksi dari dokumen UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman, data cetak dan digital bersumber dari media sosial dengan berbagai flafon. Secara kebetulan peneliti

adalah pelaku dari kegiatan UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman. Dengan dasar tersebut peneliti menjadi mudah dalam pengumpulan data, sebab kualitas seorang peneliti kualitatif menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut (Abubakar, 2021)[7].

Teknik Analisa data, data peneliti membagi menjadi dua yaitu: a) library research dimanfaatkan untuk melakukan analisa dan review data yang telah dikumpulkan dari hasil pembacaan peneliti baik dari tulisan cetak maupun digital terkait tema (Tapotubun & Rahmah, 2021)[8]. Selanjutnya data sekunder dan data primer diintegrasikan diolah untuk menemukan konten analisis (Sugiyanto, 2021)[9] hasilnya disajikan secara deskriptif sehingga bisa menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Konsisten dengan fokus penelitian maka, pembahasan dan diskusi hasil penelitian akan dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu: a) kepemimpinan dan budaya; b) organisasi pembelajar; dan c) pengukuran dan evaluasi dari dinamika aktivitas UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

A. Kepemimpinan dan Budaya

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu kegiatan memimpin yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan organisasi dimaksudkan untuk mengkoordinasikan, memberdayakan dan mengambil keputusan dari berbagai bagian dan sumber daya organisasi yang ada. Langkah-langkah penerapan kepemimpinan organisasi UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman sebagai sharing power dalam mewujudkan hubungan yang seimbang antara atasan dan bawahan sehingga mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman sebagai sharing power dalam mewujudkan hubungan yang seimbang antara atasan dan bawahan, anggota dan keluarga, anggota keluarga dengan anggota keluarga dilakukan dengan mekanisme normal yang bersifat persuasif legalistik yaitu dengan mendelegasikan fungsi kepemimpinan kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman kepada beberapa orang dan dibantu struktural lainnya (Ilwan dan Mesiono, 2021)[10].

Kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman mampu mempertimbangkan setiap program sehingga program berdampak: (1) memperluas tingkat analisis yang lebih terurai untuk pemenuhan anggota dan keluarga, (2) menerima masukan anggotanya yang dipertimbangkan, dan (3) terus berupaya meningkatkan kinerja performativitas. Disinilah tampak kuat kinerja organisasi merupakan konsep penting yang dapat diperlakukan dalam tatakelola organisasi, sebab dari tatakelola akan diketahui perannya secara efektif yang mampu memperluas kinerja yang lebih terdisagregasi sebagai hasil kinerja dan terakhir (3) merumuskan kembali kinerja dalam konteks performativitas untuk masa depan.

B. Organisasi Pembelajar

Salah satu cara strategis untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan adalah menjadi organisasi pembelajar, bentuk organisasi pembelajar dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman antara lain: pengarsipan dokumen pengurus terbukti profesional, mudah ditemukan dan bernilai (H.D. Elvandari dan Sugiyanto, 2023)[11], program kerja berkelanjutan antar pengurus, model kepemimpinan terbuka sehingga mampu menciptakan lingkungan ideal untuk menjamin kinerja organisasi hijau (Nuryanto dan Sugiyanto, 2024)[12] Pentingnya organisasi pembelajar dalam mendorong kinerja organisasi, terutama kapasitas organisasi dalam menghubungkannya dengan lingkungan eksternal dan keberadaan

kepemimpinan yang mendukung pembelajaran. Membahas hubungan yang lebih erat antara organisasi pembelajar dan kinerja non-finansial, serta pentingnya mendimensikan kinerja organisasi dan mengembangkan ukuran-ukuran yang sesuai. (Kim Lu, 2020)[5].

C. Pengukuran dan Evaluasi

1. Pengukuran

Pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi adalah merupakan proses yang melibatkan berbagai kerangka kerja dan alat untuk menilai indikator keuangan dan non-keuangan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman. Sistem pengukuran kinerja yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk menyelaraskan strategi mereka dengan hasil operasional. Atas dasar itu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman harus dan selalu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan anggota sebagai pasar yang dilayani, sehingga Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman memiliki daya saing terhadap organisasi eksternal. Sikap Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dalam pemikiran pemenuhan kebutuhan anggota dan antisipatif terhadap pesaing eksternal selaras dengan model Balanced Scorecard dan model Deming Baldrige, sebagai berikut:

- a. Balanced Scorecard, media ini mengintegrasikan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, memungkinkan organisasi untuk melacak tujuan strategis dan efisiensi operasional (Catalina et al., 2010) (Guterman, 2023)[13].
- b. Deming dan Baldrige, focus pada kerangka kerja yang menegakan manajemen kualitas dan peningkatan berkelanjutan, dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan efektivitas organisasi (Catalina et al., 2010).

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendalami metrik keuangan dan metrik non keuangan mengikuti Guterman (2023), sehingga semua kepentingan pemangku kepentingan dapat terakomodir yang berdampat peningkatan profit dan kemampuan penambahan asset sehingga organisasi ada kepastian keberlanjutannya.

2. Evaluasi

Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Guna evaluasi adalah untuk menjamin bahwa apa yang UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman jalankan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai atau mengukur kinerja, efektivitas, efisiensi, nilai, atau manfaat suatu aktivitas, program, proyek, kebijakan, atau sistem. Evaluasi tidak terbatas pada aktivitas teknis, melainkan juga non-teknis.

Menurut Worthen and Sanders (1973)[14] tujuan evaluasi adalah menjalankan proses untuk mencari sesuatu yang berharga, baik berupa program, informasi, produksi, maupun alternatif prosedur. Sehingga evaluasi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya mengukur keberhasilan, seleksi, diagnosis, penempatan. Salah satu contoh pengurus mencari informasi akan kebutuhan anggota dan keluarga.

Setelah tujuan diketahui maka akan diketahui: a) tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi., b) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi., c) mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan., d) memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Tahapan evaluasi bukanlah aktivitas instan, melainkan sebuah kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan: a) menentukan aspek yang akan dievaluasi, b) mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan, c) mengumpulkan data evaluasi, d) menganalisis dan mengolah data, e) serta melaporkan hasil evaluasi kepada atasan dan kepada seluruh anggota.

Metode evaluasi yang dipakai Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman ada dua metode, yaitu: a) metode evaluasi dengan analisis biaya-manfaat yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen yang termasuk manfaat (benefit) dan yang tergolong biaya (cost). Komponen-komponen tersebut bisa bersifat nyata (tangible) maupun tak nyata (intangible). b) metode evaluasi program dan kebijakan, dilakukan evaluasi dengan dua pendekatan yaitu: 1) evaluasi semu (pseudo evaluation), evaluasi semu dengan pendekatan deskriptif tanpa perlu bertanya secara langsung kepada anggota secara perorangan ataupun kelompok.2) evaluasi formal, dilakukan berdasarkan program/kebijakan yang dituju dan para pembuat kebijakan yang terdiri pengurus itu sendiri dan administrator program, atas dasar itu peneliti memilih dengan teknik klarifikasi nilai, pemetaan sasaran, analisis dampak silang, pemetaan hambatan, dan discounting.

Peneliti tegaskan bahwa evaluasi berbeda dengan pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah proses menentukan nilai, sedangkan pengukuran adalah membandingkan hasil dengan standar yang sudah ditetapkan, dan penilaian adalah pengambilan keputusan menggunakan informasi hasil pengukuran.

Mekanisme evaluasi, umpan balik dan kontrol umpan-maju: skema evaluasi kinerja harus selaras dengan langkah-langkah memfasilitasi keputusan untuk meningkatkan efektivitas manajerial dan identifikasi kemampuan strategis (Grafton et al., 2010) (Nicula et al., 2017). Mekanisme seperti ini ada keberlanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang mempengaruhi keberhasilan organisasi jangka panjang.

Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan anggota antara lain :

1. Program Tali Asih bagi anggota KORPRI purna tugas, masing masing memperoleh tali asih sebesar Rp 1.500.000,-

Data 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa penerima manfaat Program Tali Asih ini relatif stabil yaitu, penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 660 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 688 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 648 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 666 orang. Program ini diterimakan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember. Bagi anggota Korpri yang Purna Tugas pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni akan diterimakan pada bulan Juni. Sedangkan Bagi anggota KORPRI yang Purna Tugas pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember akan diterimakan pada bulan Desember. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman dengan mengundang seluruh penerima. Program tali asih ini secara simbolis diserahkan oleh pimpinan daerah seperti Bupati atau Wakil Bupati. Ajang pemberian Tali Asih ini menjadi ajang yang dinantikan para anggota KORPRI yang Purna Tugas, karena ajang ini menjadi ajang reuni dan temu kangen dengan teman sejawat yang walaupun baru beberapa bulan saja tidak bertemu.

2. Program santunan Dana Sosial bagi Anggota KORPRI meninggal dunia, masing-masing ahli waris anggota KORPRI yang meninggal memperoleh santunan Rp.8.000.000,-

Program santunan Dana Sosial ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 68 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 32 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 53 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 38 orang. Santunan akan ditransfer ke rekening ahli waris setelah ada pengajuan dari Unit KORPRI tempat yang bersangkutan semasa hidup bertugas. Selain mendapatkan santunan ini anggota KORPRI tersebut juga mendapatkan Karangan Bunga dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dan Upacara

persemayaman Jenazah. Namun dimulai sejak tahun 2025 ini, Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi anggotanya, maka santunan akan diantar dan diserahkan langsung ke ahli waris pada hari yang sama anggota KORPRI tersebut meninggal Dunia.

3. Program santunan Dana Sosial bagi Anggota KORPRI sakit dan opname di Rumah Sakit, masing-masing memperoleh santunan Rp.1.000.000,-.

Program santunan Dana Sosial ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang sakit dan opname minimal 2 hari. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 332 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 227 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 305 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 403 orang. Santunan akan ditransfer ke rekening yang bersangkutan setelah semua syarat lengkap dan diajukan oleh Unit KORPRI tempat yang bersangkutan bertugas. Salah satu syarat yang harus ada adalah surat keterangan Opname yang menunjukkan waktu opname minimal 2 hari dari rumah sakit. Program ini tidak terkait dengan program-program pemerintah lainnya seperti BPJS atau yang lainnya. Maksudnya adalah walaupun biaya opname di Rumah Sakit sudah ditanggung BPJS tetap saja bisa mengajukan program Dana Sosial ini. Namun program ini ada batasnya yaitu setiap Anggota KORPRI hanya berhak menerima 2 kali dalam setahun.

4. Program santunan Dana Sosial family adalah program santunan dana sosial yang diberikan kepada anggota KORPRI yang suami/istri nya meninggal dunia, dengan perolehan masing-masing Rp 1.500.000,- dan karangan bunga.

Program santunan Dana Sosial ini diperuntukkan bagi suami atau istri anggota KORPRI yang meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 60 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 27 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 34 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 30 orang. Santunan akan ditransfer ke rekening anggota KORPRI setelah ada pengajuan dari Unit KORPRI tempat yang bersangkutan semasa hidup bertugas. Selain mendapatkan santunan ini anggota KORPRI tersebut juga mendapatkan Karangan Bunga dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman.

5. Program santunan Dana Sosial bagi Anggota KORPRI sakit terminasi, masing-masing memperoleh santunan Rp.750.000,-.

Program santunan Dana Sosial ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang mengalami sakit terminasi seperti cuci darah atau kemotherapy. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 62 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 67 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 62 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 73 orang. Santunan akan ditransfer ke rekening yang bersangkutan setelah ada pengajuan dari Unit KORPRI tempat yang bersangkutan bertugas. Salah satu syarat yang harus ada adalah surat keterangan tindakan cuci darah atau kemotherapy. Program ini tidak terkait dengan program-program pemerintah seperti BPJS atau asuransi lainnya. Sehingga walaupun biaya tindakan sudah ditanggung oleh BPJS atau asuransi maka tetap saja bisa mengajukan pencairan program Dana Sosial ini. Namun program ini dibatasi yaitu setiap Anggota KORPRI hanya berhak menerima 2 bulan sekali atau maksimal 6 kali dalam setahun. Bantuan ini akan tetap diberikan selama penerima masih menjadi anggota aktif KORPRI.

6. Program pendampingan dan pemberian bantuan keuangan bagi anggota korpri yang terkena kasus hukum.

Program bantuan keuangan ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang mengalami masalah hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya secara kedinasan. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 5 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 tidak ada, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 4 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 4 orang. Besaran bantuan keuangan beragam disesuaikan dengan tingkatan berat atau ringan kasus yang dihadapi. Penentuan siapa yang berhak dibantu dan besaran bantuan keuangan yang akan diberikan diputuskan melalui mekanisme rapat di Dewan Pengurus KORPRI utamanya di Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum. Mekanisme pengajuan bantuan adalah calon penerima bantuan bersurat secara pribadi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman. Kemudian Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman akan menelaah masalah hukum yang dihadapai anggota KORPRI tersebut untuk kemudian dinyatakan layak dibantu atau tidak. Selanjutnya Dewan Pengurus KORPRI akan memutuskan berapa nominal bantuan Hukum yang akan diberikan. Bantuan keuangan ini direncanakan akan diberikan sebanyak 3 kali atau berdasarkan tingkatan sidang pengadilan yang dilalui anggota KORPRI tersebut.

7. Santunan bagi anggota KORPRI yang terkena musibah atau sakit berat sebesar 2.500.000,- juta rupiah dalam rangka HUT KORPRI.

Santunan ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam atau sakit berat yang dalam jangka waktu beberapa bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya atau tidak masuk kerja. Perwakilan dari Dewan Pengurus KORPRI akan berkunjung sekaligus menjenguk yang bersangkutan sekaligus menyampaikan santunan. Sumber bantuan ini selain dari iuran Anggota KORPRI juga di dukung oleh Baznas Kabupaten Sleman. Penyerahan santunan ini dilaksanakan setahun sekali bersamaan dengan rangkaian kegiatan HUT KORPRI. Jumlah penerima manfaat dari program ini selama 4 tahun terakhir yaitu penerima manfaat pada tahun 2021 sejumlah 3 orang, penerima manfaat pada tahun 2022 sejumlah 6 orang, penerima manfaat pada tahun 2023 sejumlah 3 orang dan penerima manfaat pada tahun 2024 sejumlah 4 orang.

8. Program pengabdian masyarakat KORPRI Peduli yaitu berupa pemberian bantuan ke daerah yang terkena bencana.

Program ini menasarkan daerah-daerah yang mengalami bencana alam baik yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman ataupun diluar Kabupaten Sleman. Pendanaan kegiatan ini berasal dari iuran anggota KORPRI ataupun dari penggalangan Dana KORPRI Peduli Bencana yang dilaksanakan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman. Bantuan ini secara teknis diantar langsung diserahkan dan kepada Dewan Pengurus KORPRI wilayah tempat terjadinya bencana. Berikut data daerah atau wilayah yang menjadi sasaran bantuan KORPRI Peduli bencana selama empat tahun terakhir.

1. Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 60.000.000 dilaksanakan pada Tahun 2021.
2. Bencana Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur sebesar Rp 235.000.000 dan Bencana Gempa Bumi di Cianjur Jawa Barat sebesar Rp357.647.000 dilaksanakan pada tahun 2022.
3. Bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel sebesar Rp 15.000.000 dilaksanakan pada tahun 2023.
4. Bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel sebesar Rp 20.000.000 dilaksanakan pada tahun 2024.

Dari berbagai macam program kesejahteraan bagi anggota KORPRI ini, penulis berhasil mewawancara beberapa informan yaitu anggota Korpri untuk diminta tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Berikut hasil cuplikan wawancaranya:

“Para personilnya sangat kompeten melayani dengan sepenuh hati, petugasnya ramah-ramah, sat-set. Pertahankan, kami bangga pada Korpri Sleman apalagi di bawah komandan Bapak Kuncoro” (Ihsan Yoga Triyanto, 2025)

“Program kerja unggulan korpri banyak sekali, namun menurut saya yang paling bagus adalah program kesejahteraan anggota yaitu pemberian dana sosial kepada anggota dengan akses yang sangat mudah dan cepat” (Supardana, 2025)

“Memang layak, programnya hebat, pelayanan dansos yang dibutuhkan anggota kilat, layanan klaim kematian cepat, mampu menggerakkan unit diberbagai kegiatan baik kemanusian maupun kesehatan khususnya olahraga dan mengembangkan ajang prestasi anggota” (Sumarah, 2025)

“Program yg masih berjalan santunan iuran dan Tali Asih serta adanya pembinaan kepada seluruh anggta Korpri Sleman. Kegiatan lomba Korpri dan kegiatan lomba non olahraga di Korpri Sleman sampai saat ini masih berjalan baik dan tidak dimiliki oleh KORPRI di Kabupaten lain yang ada di DIY. Adanya penjaringan anspirasi bagi anggta Korpri adalah bentuk betapa Korpri Kabupaten Sleman maju inovatif dan kreatif. Adanya majalah bulanan juga sebagai sarana informasi yang memberikan sajian bermanfaat..”(Supiyo Purnomo, 2025)

“Soliditas dan keaktifan pengurus maupun anggota menjadi kunci utama jalannya organisasi KORPRI, seiring dengan transparansi dan inovasi pengelolaan maka tujuan korpri bagi anggota semoga terwujud” (Funtu Rahmatu, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan ini diperoleh informasi bahwa tanggapannya tentang program Dewan Pengurus KORPRI tersebut adalah personilnya kompeten dan sepenuh hati dan mereka bangga terhadap KORPRI. Bentuk program penggalangan dan pendistribusian Dana Sosial KORPRI Kabupaten Sleman banyak sekali, ada yang harian, bulanan, semesteran dan tahunan. Dana sosial yang harian adalah pencairan dana Sosial anggota meliputi Dana Sosial Opname, Sakit Terminasi, Family dan Meninggal Dunia. Tanggapan anggota Korpri atas prestasi tersebut secara garis besar dapat dikelompokan sebagai berikut yaitu:

1. Pengurusnya aktif dan solid, keaktifan pengurus maupun anggota menjadi kunci utama jalannya organisasi KORPRI, selalu dengan transparansi dan inovasi pengelolaan maka ujuan korpri bagi anggota semoga terwujud.
2. Programnya hebat, lanjutkan dengan mengembangkan ajang prestasi inovasi anggota KORPRI pada kualitas layanan masyarakat.

Adapun tanggapan mereka beragam namun bisa dirangkum menjadi 3 jenis yaitu, kepengurusan yang solid dan berkinerja baik, program-program Korpri yang inovatif dan kreatif serta manfaat yang dirasakan oleh seluruh anggota KORPRI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Kepemimpinan dan budaya organisasi UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman sebagai *sharing power* dalam mewujudkan hubungan yang seimbang antara atasan dan bawahan, anggota dan keluarga, anggota keluarga dengan anggota keluarga dilakukan dengan mekanisme normal yang bersifat persuasif legalistik yaitu dengan mendelegasikan fungsi kepemimpinan kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Sleman kepada beberapa orang dan dibantu struktural lainnya.

2. Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman ini adalah organisasi pembelajar dimana organisasi ini secara terus-menerus dan terencana menciptakan, memperoleh, dan memindahkan pengetahuan untuk beradaptasi, bertransformasi, dan terus meningkatkan diri. Organisasi ini juga memupuk budaya di mana setiap anggota didorong untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, mendorong inovasi, dan mengubah perilaku berdasarkan wawasan baru.
3. Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan pengukuran dengan membandingkan program-program kerjanya secara kuantitatif. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dengan menilai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan suatu program atau kegiatan untuk membuat keputusan perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Yu, “Antecedents of Organizational Performance: A Literature Review,” *Adv. Econ. Manag. Polit. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 20–31, Sep. 2023, doi: 10.54254/2754-1169/9/20230345.
- [2] I. Yuningsih, B. Y. Prasetyo, and Samidi, “Design and Implementation of Tangerang Regency Korpri and Cooperative E-Commerce Service Applications,” *INOVTEK Polbeng - Seri Inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 963–973, 2024, doi: 10.35314/0k156p07.
- [3] R. Ramadiani and R. Kurniawan, “Application of Technique for Order Preference Method by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) Priority of KORPRI Housing Recipient,” *Int. J. Eng. Inf. Sci. Appl. Sci. IJEIS-AS*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2018.
- [4] D. Kurnia and E. Maiyana, “The Selection of KORPRI Scholarship Recipients Using Sugeno’s Fuzzy Logic,” *Knowbase Int. J. Knowl. Database*, vol. 3, no. 2, p. 116, 2023, doi: 10.30983/knowbase.v3i2.6585.
- [5] K. Kim and Z. Lu, “Learning Organization and Organizational Performance,” *Oxf. Handb. Learn. Organ.*, pp. 332–346, Dec. 2019, doi: 10.1093/OXFORDHB/9780198832355.013.18.
- [6] M. Rahardjo, “Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya,” 2017.
- [7] R. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, vol. 1. 2021.
- [8] H. H. Tapotubun and H. Rahmah, “View of Religiusitas Digital Dan Dimensi Perlawanan Milenial Dalam Ruang Online,” *Jurnal*, vol. 15, no. Sosiologi Reflektif, pp. 298–317, 2021.
- [9] Sugiyanto, “Dampak Triangulasi Hasil Terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY,” *Pendidikan*, vol. 16, no. 8, pp. 7219-7232., 2021.
- [10] I. Ilwan and M. Mesiono, “Kepemimpinan Organisatoris Sebagai Sharing Power Dalam Mewujudkan Keseimbangan Hubungan Atasan Dan Bawahan Pada MtsN 10 Bireuen,” *Pionir J. Pendidik.*, vol. 10, no. 3, pp. 40–50, 2022, doi: 10.22373/pjp.v10i3.12178.
- [11] H. D. Elvandari and Sugiyanto, “Optimalisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Gnsta) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.,” *Inov. Penelit.*, vol. 4, no. 3, pp. 601-620., 2023.
- [12] Nuryanto and Sugiyanto, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat Berbasis RW*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- [13] A. S. Guterman, “Organizational Performance and Effectiveness,” *SSRN Electron. J.*, Aug. 2023, doi: 10.2139/SSRN.4532570.
- [14] S. James R and W. Blaine R, “Evaluasi pendidikan: teori dan praktik,” *Pendidikan*, 1973.